



**LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**



**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini disusun berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Pada Laporan Kinerja ini disajikan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Lingkungan Strategis yang berpengaruh, Renstra Dinas, Indikator Kinerja, Capaian dan Analisis Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Strategi Pemecahan Masalah, Capaian masing-masing Indikator Kegiatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, Januari 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru,



ABU YAJID BUSTAMI, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19660711 198703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi	5
1.3. Struktur Organisasi	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi	21
1.5 Sistematika Penyajian	25
BAB II.....	26
PERENCANAAN KINERJA	26
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama	26
BAB III.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja	31
BAB IV	75
PENUTUP.....	75
4.1 SIMPULAN	75
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	7777

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu meningkat permintaanya sehingga semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Ketersediaan pangan sebaiknya jumlahnya mencukupi serat, bermutu baik dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah.

Salah satu komoditas pangan utama yang paling dominan dikelola di setiap daerah di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarbaru adalah padi yang nantinya akan diolah menjadi beras sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan pangan pada saat ini dan yang akan datang harus bisa terpenuhi, oleh sebab itu perlu suatu pendekatan baru dalam perkembangan pertanian maupun perikanan, agar kebutuhan pangan yang terus meningkat dapat terpenuhi dikarenakan terus bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang.

Pembangunan dalam bidang pertanian maupun perikanan pada saat ini dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan dengan sistem agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kuantitas, produktivitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha pertanian maupun perikanan, baik yang dikelola secara mandiri maupun kemitraan. Pembangunan pertanian dan perikanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Walaupun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kendala di sektor pertanian maupun perikanan yang juga menjadi isu strategis

pada sektor tersebut, diantaranya lajunya pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian yang masih tinggi, regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia serta permodalan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada di sector pangan, pertanian maupun perikanan saat ini.

Pada setiap akhir pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan evaluasi kinerja melalui suatu hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), dimana dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian kinerja dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu bagaimana mewujudkan suatu Laporan kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil kinerja suatu organisasi pemerintahan.

1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Struktur dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Banjarbaru, dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

- a. Perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Ketahanan Pangan serta Bidang Penyuluhan;
- d. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat terhadap terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian adalah sebagai berikut :

1.3.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Bidang Penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan dan bidang Penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1.2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan ;
- c. Sub Bagian Keuangan

1.3.1.3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- 1.3.1.3.1. Seksi Mutu Keamanan Pangan ;
- 1.3.1.3.2. Seksi ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 1.3.1.3.3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

1.3.1.4. Bidang Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :

- 1.3.1.4.1. Seksi Tanaman Pangan ;
- 1.3.1.4.2. Seksi Pertanian dan Perkebunan ;

1.3.1.5. Bidang Perikanan, terdiri dari :

- 1.3.1.5.1. Seksi Budidaya dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- 1.3.1.5.2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;

1.3.1.6. Bidang Peternakan, terdiri dari :

- 1.3.1.6.1. Seksi Budidaya, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- 1.3.1.6.2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

1.3.1.7 Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

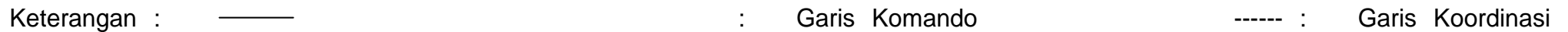
- 1.3.1.7.1 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan dan Petani ;
- 1.3.1.7.2. Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan ;

1.3.2. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari

- a. UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT);
- b. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH);
- c. UPT BPP Liang Anggang ;
- d. UPT BPP Landasan Ulin ;
- e. UPT BPP Banjarbaru ;
- f. UPT BPP Cempaka ;
- g. UPT Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan (BPTPKH)

1.3.3. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada bagan tersebut di bawah :



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2024 didukung oleh 149 orang personil, ASN terdiri dari PNS sebanyak 81 orang dan PPPK sebanyak 29 orang, Non ASN sebanyak 55 orang dan Pegawai Pusat/Provinsi yang diperbantukan sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

A. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 81 orang

terdiri dari :

1. Pejabat Struktural = 27 orang

2. Fungsional umum = 29 orang

3. Fungsional tertentu = 25 orang

2). PPPK = 29 orang

B. Pegawai Non ASN = 55 orang

Terdiri dari :

1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) = 1 orang

2) Tenaga Kontrak = 13 orang

3) Non Register = 42 orang

C. Pegawai Pusat/Provinsi yang diperbantukan

1). Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
Pangan = 5 orang

2). Penyuluh Perikanan = 7 orang

3). THL – TB Perikanan = 1 orang

4) Pengawas Benih Tanaman = 0 orang

Tabel. 1.
KEADAAN PEGAWAI DKP-3 TAHUN 2024

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SD	0	0	I/a	0	0	non eselon	21	42
2	SLTP	0	0	I/b	0	0	I.a	0	0
3	SLTA	4	0	I/c	0	0	I.b	0	0
4	D-I	0	0	I/d	0	0	II.a	0	0
5	D-II	0	0	II/a	0	0	II.b	1	0
6	D-III	4	2	II/b	0	0	III.a	0	0
7	D-IV	1	1	II/c	0	0	III.b	0	3
8	S-1	13	37	II/d	2	2	IV.a	4	12
9	S-2	5	16	III/a	4	3	IV.b	2	4
10	S-3	0	0	III/b	4	7	V.a	0	0
11				III/c	2	6	V.b	0	0
12				III/d	10	24			
13				IV/a	3	11			
14				IV/b	3	2			
15				IV/c	0	0			
16				IV/d	0	0			
17				IV/e	0	0			
	JUMLAH	28	61	JUMLAH	28	61	JUMLAH	28	61

Sumber data diambil dari Aplikasi SIMPEG Kota Banjarbaru

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan (*Threat*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi meliputi :
 - a Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan penanganan daerah rawan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan;
 - b Pengetahuan dan keterampilan petani, peternak, petani ikan dan pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru relatif masih sederhana dan mengandalkan kondisi alam;
 - c Permodalan petani pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru belum memasuki akses perbankan;
 - d Pengolahan hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan memanfaatkan bahan baku dari luar daerah belum diberdayakan secara optimal;
 - e Investor dalam bidang agribisnis belum berkembang.
2. Peluang (*Opportunity*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencapai atau mampu melampaui pencapaian dalam mencapai visi dan misi meliputi:
 - a Dukungan dan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Legislatif dalam pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terutama untuk pengolahan hasil (agroindustri);
 - b Akses transportasi dan informasi yang memadai untuk berhubungan dengan kabupaten dan kota lainnya;
 - c Adanya Lembaga Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi yang berbasis pertanian, peternakan dan perikanan baik negeri maupun swasta Kota Banjarbaru;
 - d Permintaan terhadap produk agribisnis cukup tinggi terlebih dengan adanya permintaan terhadap hasil pertanian yang organik;
 - e Letak Kota Banjarbaru yang strategis untuk memasarkan produk komoditi agribisnis yang dihasilkan.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut diatas dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru, karena itu dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru yang menjadi ruang lingkup SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

dan Perikanan Kota Banjarbaru tidak terlepas dari Tantangan (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi selama tahun 2024 yang kemudian diimplementasikan menjadi visi dan misi, kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan.

Tujuan tersebut lebih lanjut diinterpretasikan menjadi sasaran. Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut maka dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru.

Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari program tersebut diimplementasikan menjadi kegiatan sebagai ujung tombak dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan dan keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya alamnya sendiri maupun sumberdaya manusianya sebagai pelaksana.

3. *Permasalahan*

Pembangunan periode 2021-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2016-2021). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta penanganan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta ketahanan pangan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2021-2026, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi ketahanan pangan, pertanian dan

perikanan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertambahan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk baik karena kelahiran atau adanya perpindahan penduduk, menyebabkan terjadi kenaikan permintaan atas produk pangan. Tingginya kebutuhan akan bahan pangan dan produk pangan menyebabkan permintaan semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan persediaan bahan pangan dan produk pangan yang berdampak kepada terjadinya kerawanan pangan.

Ditambah lagi pola pangan yang sama terutama kebutuhan akan beras yang semakin tinggi menyebabkan tingginya permintaan beras di masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan diversifikasi akan bahan pangan dan produk pangan.

2. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

a. Konversi lahan yang tidak terkendali

Keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian/perkebunan, dan perikanan yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah dan perkebunan lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai areal pembangunan perumahan/pemukiman, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada pertanian/perkebunan, dan perikanan.

b. Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan sector pangan, pertanian dan perikanan yang ada di Kota Banjarbaru sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan ada yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga

mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup.

Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

c. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

d. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Kondisi kepemilikan lahan yang sering bermasalah antara lain disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian/perkebunan untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah dan lahan perkebunan/ karet. Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang ada maupun pembukaan lahan baru.

3. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah sistem pengairan atau jaringan irigasi. Ketiadaan waduk di Banjarbaru membuat sistem pengairan mengandalkan pada kondisi alam. Selain itu, prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani maupun jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat

meningkatkan produksi dan menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

4. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/ bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan

perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Sistem perbibitan diperlukan untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan. Kelembagaan perbibitan ini untuk memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

5. Regulasi

Pengembangan sektor pertanian/perkebunan yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya

yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing instansi. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan. Pengembangan pertanian/perkebunan dan perikanan memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui Formulasi Kebijakan.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Pemerintah daerah berupaya untuk mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) Peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan.

6. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- a. Kelembagaan petani, peternak dan petani ikan yang belum mempunyai posisi yang kuat

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian masih ada yang orientasinya hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan

usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

b. Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan.

c. Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini

menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan.

Secara umum, mereka beranggapan bahwa sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

7. Permodalan

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah. Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani

serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

1.4.1.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu *“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”*.

Penjelasan Visi

Banjarbaru Juara Terdiri Atas tiga Aspek Penting Yaitu :

- a. Maju adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
- b. Agamis adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang agamis, berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- c. Sejahtera adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik.

1.4.1.2. Misi

Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJMD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hal tersebut, Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang langsung berkenaan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah Misi 2 sebagai berikut :

“Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”

Di wujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan dan peningkatan ekonomi

masyarakat, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup

3. TUJUAN DAN SASARAN

a) Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mendukung tujuan pada RPJMD adalah

“Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”

Begitu pula dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya.
4. Meningkatnya Sumberdaya Perikanan.
5. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan
6. Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan
7. Meningkatnya Penyediaan Prasarana Pertanian
8. Meningkatnya Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru
9. Meningkatnya Kelembagaan Penyuluhan dan Petani

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan

3. Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun
4. Peningkatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar
5. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya
6. Peningkatan sumberdaya perikanan
7. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan
8. Peningkatan pengembangan sarana pertanian/peternakan
9. Peningkatan populasi ternak
10. Peningkatan penyediaan prasarana pertanian
11. Peningkatan status kesehatan hewan
12. Peningkatan kelembagaan penyuluhan dan petani

Kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
3. Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal
4. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun
5. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
6. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota
7. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
8. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
9. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota
10. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan
11. Pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum
12. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
13. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

14. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
15. Pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
16. Pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan tanaman skala kecil.
17. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
18. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian
19. Pembebasan penyakit hewan menular dan zoonosis
20. Penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner
21. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
22. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
23. Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian

ISU STRATEGIS SKPD

Isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah ;

“Belum Optimalnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”.

Penetapan isu strategis tersebut didasarkan kepada beberapa kondisi daerah saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan karena tingginya alih fungsi lahan ;
2. Kelompok Tani sebagian besar belum memiliki badan hukum ;
3. Minat masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan semakin berkurang ;
4. Sumber daya aparatur yang belum berkarakter dan berjiwa melayani ;
5. Daya saing produk rendah ;
6. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan ;
7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan .

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi , isu strategis organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Memuat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Capaian Kinerja Eselon II

BAB IV. PENUTUP

Memuat simpulan dan strategi peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wali Kota Banjarbaru. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh Bidang dan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Esselon II berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta dengan targetnya.

Untuk lebih jelasnya Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dapat dilihat pada bagian Lampiran dari Laporan Kinerja ini.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja menyajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru ada 4 (empat) Sasaran Strategis yang digunakan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang disertai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk kesehatan. Kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Konsumsi pangan tersebut perlu memenuhi satu standar ukuran baik kualitas maupun kuantitasnya termasuk komposisinya yang dikenal dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Dalam penerapannya di masyarakat, menu yang mengikuti PPH dikenal dengan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman atau dikenal dengan istilah menu B2SA.

Untuk Sasaran Strategis Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama yang digunakan yaitu Skor PPH Konsumsi, yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90,30

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran ini dipilih karena Sektor Perikanan juga merupakan salah satu sektor unggulan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dalam upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani bagi masyarakat Kota Banjarbaru.

Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya ini Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, dimana pada tahun 2024 target nya sebesar 450,85 ton.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Produksi Pertanian

Produksi pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena hasil usaha pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat termasuk kelompok tani. Selain tanaman pangan, peternakan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian. Produksi pertanian dalam hal ini tanaman pangan (padi) dan peternakan akan terus ditingkatkan, karena kebutuhan pangan khususnya padi dan ternak bagi masyarakat akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah termasuk Kota Banjarbaru, sehingga sektor pertanian ini akan selalu ditingkatkan dan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan dan peternakan.

Untuk mengukur sasaran meningkatnya Produksi Pertanian ini digunakan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi), dengan target 7.082,69 ton.
2. Jumlah Populasi Ternak, dengan target 2.905.400 ekor

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani

Kelembagaan Penyuluh dan petani merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian, karena penyuluh dan petani adalah ujung tombak agar produktivitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan. Kelembagaan penyuluh dan petani diperlukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan penyuluhan.

Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator utama yaitu Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas/score, dengan target 69 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya media akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang dapat menjadi alat oleh pihak yang memberi kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.

Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input, output dan outcome. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi dan merupakan suatu rencana yang dibuat pada awal tahun anggaran, dan selanjutnya pada akhir tahun akan dibandingkan dengan realisasinya yang merupakan pencapaian dari hasil pelaksanaan kinerja kegiatan, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan jika ada maupun keberhasilan yang dicapai, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang. Hasil Pengukuran kemudian dikategorisasikan ke dalam 4 (empat) kategori pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel.2
Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1.	Nilai > 90 – 100	AA (sangat memuaskan)
2.	Nilai > 80 – 90	A (memuaskan)
3.	Nilai > 70 – 80	BB (sangat baik)
4.	Nilai > 60 – 70	B (Baik)
5.	Nilai > 50 – 60	CC (Cukup/memadai)
6.	Nilai > 30 – 50	C (kurang)
7.	Nilai > 0 – 30	D (sangat kurang)

3.1 Capaian Kinerja Eselon II

Analisis atas tingkat pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,35	88,60	98,06%	AA (sangat memuaskan)
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	450,85 ton	464,37 ton	103 %	AA (sangat memuaskan)
3.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	7.224,34 ton	7.794,36 ton	107,89 %	AA (sangat memuaskan)
		Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2.905.400 ekor	2.977.722 ekor	102,49 %	AA (sangat memuaskan)

5.	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas (score)	69 %	69,25 %	100,36%	an) AA (sangat memuaskan)
----	--	--	------	---------	---------	-------------------------------------

Sumber data diolah DKP-3 Tahun 2024

3. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkamewujudkan visi dan misi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Adapun evaluasi kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk kesehatan. Kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (kilogram/kapita/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kapita/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kapita/hari). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain. Skor PPH didapatkan melalui perhitungan berikut :

$$\text{PPH} = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi} \times \text{Bobot masing-masing kelompok pangan}$$

Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan zat gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Analisis konsumsi pangan level kabupaten/kota berdasarkan data Susenas 2024 menggunakan Angka Kecukupan Energi (TKE) anjuran sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein (TKP) 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG tahun 2018; Permenkes 28/2019).

$$\begin{aligned} \text{TKE} &= \text{perbandingan antara total konsumsi energi penduduk terhadap} \\ &\quad \text{Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kap/hari} \times 100\% \\ \text{TKP} &= \text{perbandingan antara total konsumsi protein penduduk terhadap} \\ &\quad \text{Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kap/hari} \times \\ &\quad 100\% \end{aligned}$$

Pencapaian sasaran Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dengan indicator Skor PPH Konsumsi untuk target dan realisasi nya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Scoring	90,35	88,60	98,06 %

Berdasarkan Tabel 4 diatas, indicator kinerja Skor PPH Konsumsi pada Tahun 2024 di targetkan sebesar 90,35 dan terealisasi sebesar 88,60 atau dengan capaian kinerja sebesar 98,06 % dengan kategori capaian AA (sangat memuaskan). Skor PPH yang dihasilkan dari perhitungan data Susenas 2024 sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan karena beberapa hal diantaranya :

1. Perkembangan pola konsumsi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat) kontribusi umbi-umbian masih rendah, beras dan terigu kelompok padi-padian mendominasi.
2. Stigma yang selama ini berkembang dimasyarakat yaitu **tidak kenyang kalau tidak makan nasi**.
3. Harga pangan daging ruminansia dan unggas yang lebih mahal dampak dari inflasi yang terjadi.

Walaupun terjadi penurunan skor PPH namun pola konsumsi pangan masyarakat Kota Banjarbaru sudah semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan yaitu menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai diversifikasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada gen z dan milenial khususnya para pelajar SMP dan SMA yang ada di Kota Banjarbaru, serta masyarakat yang tergabung pada pokmas karang taruna yang ada di Kota Banjarbaru sebagai perpanjangan tangan Dinas dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan untuk meningkatkan skor PPH agar semakin mendekati ideal atau sempurna (100).

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari score pangan (dietary csore) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi score PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Hasil perhitungan Score PPH Kota Banjarbaru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.
SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL TAHUN 2024
KOTA BANJARBARU

No.	Kelompok pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Skor PPH
		Berat Pangan Gr/kapita/hari	Kkal/kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	
1.	Padi-padian	260.8	1,032	51.5	49.1	0.5	25.7	24.6	25.0	24.6
2.	Umbi-umbian	31.4	35	1.7	1.7	0.5	0.9	0.8	2.5	0.8
3.	Pangan Hewani	165.9	376	18.8	17.9	2.0	37.5	35.8	24.0	24.0
4.	Minyak dan Lemak	29.5	265	13.2	12.6	0.5	6.6	6.3	5.0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	1.4	8	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	1.0	0.2
6.	Kacang-kacangan	20.8	53	2.7	2.5	2.0	5.3	5.1	10.0	5.1
7.	Gula	20.5	76	3.8	3.6	0.5	1.9	1.8	2.5	1.8
8.	Sayur dan Buah	233.6	114	5.7	5.4	5.0	28.4	27.1	30.0	27.1
9.	Lain-lain	98.5	45	2.3	2.2	-	-	-	-	-
	Total		2,004	100.0	95.4		106.6	101.7	100.0	88.6

Keterangan : data diolah dengan Aplikasi Harmonisasi Data Susenas tahun 2024

Dari tabel 5 diatas terlihat untuk Kota Banjarbaru skor PPH sebesar 88.6 dengan konsumsi energi sebesar 2.004 (95,43% AKE). Angka 88,6 ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kota Banjarbaru semakin beragam dan berimbang namun masih perlu ditingkatkan lagi keragaman sumber karbohidrat terutama dari kelompok umbi-umbian.

Adapun situasi dan pola konsumsi pangan penduduk Kota Banjarbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6. Analisis Situasi dan Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Kelompok Pangan	Rata-rata		Kontribusi Pangan Strategis		
		gr/hari	Kg / tahun	Jenis Pangan	Kg / tahun	%
1.	Padi-padian	260.8	95.2	Beras	77.4	81.30
2.	Umbi-umbian	31.4	11.4	Singkong	8.2	71.92
3.	Pangan Hewani	165.9	60.6	Telur	10.0	16.50
4.	Minyak dan Lemak	29.5	10.8	Minyak Lainnya	0.4	3.70
5.	Buah/Biji Berminyak	1.4	0.5	Kemiri	0.2	40.00
6.	Kacang-kacangan	20.8	7.6	Kacang kedelai	7.2	94.74
7.	Gula	20.5	7.5	Gula Pasir	7.0	93.33
8.	Sayur dan Buah	233.6	85.3	Sayur	42.6	49.94
9.	Lain-lain	98.5	35.9	Minuman	32.5	90.5

Keterangan : data diolah dengan Aplikasi Harmonisasi Data Susenas tahun 2024

Situasi dan pola konsumsi pangan penduduk Kota Banjarbaru tahun 2024 masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama konsumsi beras yang masih tinggi yaitu 77,4 kg/kap/tahun atau 212 gram/kap/hari dari total 95,2 kg/kap/tahun. Untuk konsumsi singkong pada kelompok umbi-umbian masih tergolong tinggi walaupun di angka yang masih cukup rendah yaitu 8,2 kg/kap/tahun. Kondisi ini terjadi karena adanya suatu **stigma** yaitu karena kurangnya pengetahuan dalam diri seseorang terkait dengan suatu hal, seperti stigma tidak kenyang kalau tidak makan nasi.

Kelompok pangan hewani konsumsi penduduk terbanyak pada konsumsi telur dibandingkan dengan konsumsi daging ruminansia dan unggas yaitu sebesar 10,0 kg/kap/tahun. Hal ini berkaitan dengan harga pangan daging ruminansia lebih mahal dibandingkan dengan harga telur juga kemudahan dalam akses baik ketersediaan maupun keterjangkauan. Konsumsi susu juga masih rendah yaitu hanya 3,8 kg/kap/tahun, padahal susu juga merupakan sumber pangan hewani. Rendahnya konsumsi susu di Kota Banjarbaru maupun di Indonesia secara umum disebabkan oleh 2 hal yaitu jumlah produksi susu dan kebiasaan minum susu. Kebiasaan minum susu/rendahnya konsumsi susu masyarakat bukan karena tidak mampu membeli susu, tapi lebih disebabkan faktor belum terbiasa mengonsumsi susu terutama susu sapi murni. Apalagi Kota Banjarbaru saat ini tidak ada lagi produksi susu sapi seperti yang dulu pernah dikembangkan pada tahun 2014.

Pada kelompok sayur dan buah, penduduk Banjarbaru meningkat dalam mengonsumsi buah dibandingkan dengan konsumsi sayur yaitu hanya sebesar 42,7 kg/kap/tahun. Namun konsumsi sayur mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 42,6 kg/kap/tahun yang sebelumnya 45,0 kg/kap/tahun.

Penurunan ini diakibatkan kurangnya sikap dan pengetahuan anak muda tentang manfaat buah dan sayur bagi kesehatan (Mandagie et al., 2023 dalam Aulia, 2023). Alberta et al (2020 dalam Aulia, 2023), juga mengatakan konsumsi sayuran dan buah-buahan rendah bagi masyarakat Indonesia, khususnya remaja, antara lain karena remaja kurang memiliki pengetahuan dan sikap tentang manfaat buah dan sayur bagi kesehatan.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023

Tabel 7. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skoring	91,7	101,61 %	90,2	99,89 %	88,6	98,06 %

Berdasarkan tabel 7 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2023 adalah sebesar 90,2, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 88,6 terjadi penurunan, hal ini antara lain disebabkan oleh pola konsumsi penduduk terutama konsumsi beras yang mengalami penurunan.

- a. Perkembangan pola konsumsi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat) kontribusi umbi-umbian masih rendah, pada kelompok padi-padian masih mendominasi beras dan terigu.
- b. Konsumsi beras per kapita/tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, yaitu dari 230,1 gram/kap/hari (84,0 kg/kap/tahun) menjadi 212,0 gram/kap/hari (77,4 kg/kap/tahun).
- c. Begitu pula konsumsi terigu tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu dari 48,1 gram/kap/hari (17,5 kg/kap/tahun) menjadi 46,2 gram/kap/hari (16,9 kg/kap/tahun).

Selain itu konsumsi jagung tahun 2024 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu dari 3,2 gram/kap/hari (1,2 kg/kap/tahun) menjadi 2,6 gram/kap/hari (0,9 kg/kap/tahun).

Penurunan konsumsi beberapa kelompok pangan tersebut akhirnya juga berpengaruh pada skor PPH.

Pada tahun 2024 kegiatan sosialisasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan semakin gencar dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan masyarakat kota Banjarbaru tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang dan aman dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi mereka dalam kehidupan sehari-hari, selain itu pula semakin meningkatnya ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru, sehingga kemampuan daya beli juga meningkat, terutama daya beli terhadap kebutuhan bahan pangan pokok keluarga, selain itu disebabkan pula masyarakat kota Banjarbaru sudah mulai selektif dalam membeli bahan pangan untuk di konsumsi, sehingga bahan pangan yang dibeli sudah memperhatikan kuantitas dan kualitas gizinya serta keberagamannya. Penurunan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2024 sehingga harga pangan juga ikut naik dan mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat.

Pola pangan harapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya besaran anggota keluarga, tingkat pendidikan keluarga, pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita masyarakat Kota Banjarbaru lebih besar untuk non makanan dibandingkan untuk makanan yaitu hanya 42,21 persen. Pada pengeluaran per kapita untuk makanan, kelompok makanan dan minuman jadi (*prepared food and baverages*) menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 38,65% (Rp. 344.488). Kelompok makanan dan minuman jadi ini biasanya banyak disukai oleh gen z padahal sangat tidak beragam dan bergizi. Sedangkan kelompok umbi-umbian rata-rata pengeluaran per kapitanya di urutan terendah hanya 0,79% (Rp. 7.301).

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skoring	88,6	98,06	91,53	88,46	89,36	92,29

Berdasarkan Tabel 8 diatas, realisasi indikator kinerja Skor PPH Konsumsi Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 88,6 (dengan capaian kinerja 98,12%) adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Tanah laut (sebesar 88,46).

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Nasional

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Target Nasional Tahun 2024
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skoring	88,6	98,06	90,45	95,2

Berdasarkan Tabel 9 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Score PPH Konsumsi” Tahun 2024 adalah 88,6 dengan capaian kinerja 98,06%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 maka baru tercapai 97,95 % dan jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 95,2 , maka capaiannya sebesar 93,07%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Program Penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 2,01 %. Efisiensi ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran. Pada Tabel 5 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 98,06% dan pada Tabel 10 terlihat realisasi capaian anggaran sebesar 96,05 % pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp. 3.254.781.600,-terrealisasi sebesar Rp. 3.126.408.870,- atau dengan capaian 96,05% sehingga terjadi efisiensi 2,01%.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi, diantaranya penyuluhan, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan gizi masyarakat yang dikenal dengan penyuluhan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), Bantuan hibah Untuk Pengembangan Olahan Pangan Lokal yang tujuannya juga untuk peningkatan gizi masyarakat yang ditujukan kepada Kelompok Masyarakat UMKM yang di wilayah Kota Banjarbaru. Juga bantuan sosial berupa uang Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada posyandu dengan menekankan penganekaragaman pola konsumsi pangan B2SA.

Selain program tersebut diatas terdapat pula Kegiatan pendukung lainnya yaitu dana inflasi untuk peningkatan kualitas gizi keluarga bagi keluarga yang terdata tidak bisa makan lengkap 2x sehari dengan lokus masyarakat Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat :

- a. Meningkatkan pemahaman kepada sebagian besar masyarakat Kota Banjarbaru melalui penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis tentang makanan sehat dan bergizi, sehingga mereka mau dan mulai selektif dalam membeli dan

menyediakan bahan pangan bagi diri dan keluarganya dengan lebih memperhatikan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

- b.** Memberikan bantuan kepada pokmas posyandu berupa bantuan uang PMT agar menjadi edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan B2SA.
- c.** Memberikan bantuan kepada pokmas UMKM berupa hibah uang untuk mengembangkan olahan pangan lokal Kota Banjarbaru.
- d.** Meningkatkan peran dari Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan B2SA dan bimbingan-bimbingan teknis kepada kader pangan dan masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap capaian indikator Skor PPH Konsumsi adalah :

- a.** Adanya perubahan data yang biasanya menggunakan data primer namun dari tahun 2023 sesuai dengan Perbadan No 11 tahun 2023 tentang PPH bahwa perhitungan Skor PPH menggunakan data Susenas tahun 2024.
- b.** Peran serta dari Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, edukasi pola konsumsi B2SA dan bimbingan-bimbingan teknis kepada kader pangan dan masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
- c.** Perlunya dukungan pemerintah daerah dengan peraturan walikota untuk mengencarkan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sehingga dapat membantu menurunkan angka stunting di Kota Banjarbaru.
- d.** Mendorong masyarakat Kota Banjarbaru agar mampu memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis pangan saja dengan kegiatan penganeekaragaman pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

HAMBATAN

Capaian Skor PPH tahun 2024 menunjukkan masyarakat kelebihan dalam konsumsi minyak dan lemak, kelompok gula terutama gula pasir, sedangkan untuk sayur dan umbi-umbian konsumsinya masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu :

1. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA.
2. Aspek daya beli masyarakat terhadap pangan B2SA rendah.
3. Ketersediaan pangan yang beragam bagi masyarakat masih minim.

RENCANA TINDAK LANJUT

Perlu dilakukan secara masif peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pola konsumsi pangan B2SA dalam membangun generasi penerus yang sehat, aktif dan produktif. Sosialisasi, edukasi dan promosi adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Skor PPH konsumsi serta pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dalam penerapan pola konsumsi pangan B2SA.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja Skor PPH Konsumsi pada Tahun 2024 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.254.781.600,- terealisasi sebesar Rp. 3.126.408.870 atau dengan capaian 96.05 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Tabel Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.254.781.600,-	3.126.408.870	128.372.730	96,05
	Jumlah	3.254.781.600,-	3.126.408.870	128.372.730	96,05

Pada Tabel 10 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat adalah sebesar Rp. 3.254.781.600,- dan realisasi sebesar Rp. 3.126.408.870 dengan capaian 96,05 %.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran strategis ini dipilih karena Sektor Perikanan juga merupakan salah satu sektor unggulan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dalam upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani bagi masyarakat Kota Banjarbaru, sedangkan Indikator Kinerja nya adalah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)

Realisasi dan capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 11. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	411,62	464,37	112,81%

Berdasarkan Tabel 11 diatas, indicator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2024 di targetkan sebesar 411,62 ton dan terealisasi sebesar 464,366 ton dengan capaian kinerja sebesar 112,81%.

Metode pengambilan sampel untuk produksi perikanan budidaya dilakukan dengan cara pengambilan data langsung di lapangan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan terhadap para pembudidaya yang ada di Kota Banjarbaru. Kemudian data tersebut di masukkan (input) ke aplikasi Avdesk Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hasil dari aplikasi tersebut dijadikan sebagai data realisasi capaian tahun bersangkutan.

Penentuan target perikanan budidaya untuk Tahun 2021-2026 dengan melihat potensi wilayah Kota Banjarbaru, dimana Kota Banjarbaru mempunyai potensi wilayah perairan yang tidak terlalu luas, akan tetapi masih bisa dikembangkan usaha budidaya perikanan nya dengan cara meningkatkan teknologi budidaya nya, diantaranya Kolam Terpal Bundar, Bioflok, Kolam Air Tenang, Karamba dan Jaring Apung.

Untuk data realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Data Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Ikan

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
1.	Nila	117.683
2.	Lele	191.948
3.	Patin	47.177
4.	Haruan	6.754
5.	Papuyu	53.164
6.	Gurami	21.618
7.	Mas	25.662
8.	Belut	360
	Total	464.366 Kg = 464,366Ton

Sumber Data : Avdesk Satu data KKP

Dari tabel 12 diatas terlihat jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 di Kota Banjarbaru sebesar 464.366 Kg (464,366 ton) yang terdiri dari beberapa jenis ikan introduksi diantaranya Ikan Nila dan Ikan Mas serta ikan lokal yaitu Haruan, Papuyu, Patin, Gurame, Lele dan Belut. Dimana produksi terbesar adalah ikan lele sebesar 191.948 Kg (191, 95 ton), kemudian Ikan Nila 117.683 Kg (117,68 ton), Ikan papuyu sebesar 53.164 Kg (53,16 ton) dan seterusnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022

Tabel 13. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	449,95	112.61 %	450,85	111,17 %	464,366	112,81 %

Berdasarkan tabel 13 di atas, terlihat bahwa realisasi Tahun 2022 sebesar 449,95 ton dengan capaian 112.61%, dan Tahun 2023 realisasi sebesar 450,85 ton dengan capaian 111,17 % dan tahun 2024 realisasi sebesar 464,366 ton dengan capaian 112,81 % . Dari tabel di atas terlihat perkembangan produksi perikanan budidaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir semakin meningkat, hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya usaha budidaya ikan semakin diminati oleh masyarakat dan teknologi budidaya semakin berkembang dan mulai dikuasai dan diterapkan oleh pembudidaya ikan seperti budidaya kolam bioflok.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kota Banjarmasin	Realisasi Kab.Tala	Realisasi Prov Kalsel
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	464.366	112,81%	53.273.000	2.749.660	2.086,179	147.386.238

Berdasarkan Tabel 14 diatas, realisasi indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 464,366 ton dengan capaian 112,81%, realisasi Kota Banjarmasin sebesar 2.749,66 ton, realisasi Kabupaten Tanah Laut sebesar 2.086,18 ton, realisasi Kabupaten Banjar sebesar 53.273.000 ton dan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 147.386.238 ton . Dari data tersebut di atas terlihat realisasi

Kota Banjarbaru dibandingkan dengan wilayah sekitar, maka realisasi produksi perikanan Budidaya Kota Banjarbaru jauh lebih rendah, hal ini disebabkan Banjarbaru merupakan wilayah perkotaan dan memiliki potensi wilayah perikanan yang juga lebih rendah dari Kabupaten/Kota yang bersanding wilayah.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Target Nasional Tahun 2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	464,366	112,81 %	483,13	6.370.000

Berdasarkan Tabel 15 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 adalah sebesar 464,366 ton dengan capaian kinerja 112,81 %, namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 483,13 ton maka capaiannya baru sebesar 96,12 %, masih terdapat peluang untuk tercapai target akhir Renstra, mengingat usaha budidaya ikan semakin diminati oleh masyarakat dan teknologi budidaya semakin berkembang dan mulai dikuasai dan diterapkan oleh pembudidaya ikan seperti budidaya kolam bioflok dengan cara peningkatan pengetahuan teknis budidaya dan penggunaan bibit unggul yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ikan. Sedangkan untuk target Nasional adalah sebesar 6.370.000 ton, mengingat potensi perikanan Budidaya yang begitu besar di seluruh Indonesia, jika dibandingkan dengan realisasi Kota Banjarbaru sebesar 464,366 ton maka capaiannya hanya sebesar 7,29 %, hal ini disebabkan Banjarbaru merupakan wilayah perkotaan yang luas wilayah nya relatif lebih kecil dari daerah lain. Selain itu, jenis tanah untuk wilayah Kota Banjarbaru di dominasi oleh tanah gambut yang memiliki sifat asam yang tinggi sehingga kurang optimal untuk kegiatan budidaya perikanan.

Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya dan program penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi sumberdaya adalah sebesar 23,73%, ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran. Pada Tabel 11 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 112,81 % dan pada Tabel 16 terlihat realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan pagu sebesar Rp. 1.667.990.400 dan terealisasi sebesar Rp. 1.485.819.700 atau dengan capaian 89,08 %. Dari kedua Tabel tersebut terlihat realisasi capaian kinerja lebih tinggi 23,73 % dari pada realisasi capaian anggaran.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan Perikanan Budidaya adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Pada program tersebut dilaksanakan pembinaan, pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana perikanan serta pemberian bibit dalam rangka pengembangan budidaya perikanan di Kota Banjarbaru yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran Kinerja Indikator.

Selain program tersebut diatas terdapat pula Kegiatan pendukung lainnya yaitu dukungan dari pemerintah pusat melalui Balai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT) Mandingan Kalimantan Selatan berupa bantuan benih ikan Nila, Patin, Lele, Ikan Hias Komet, calon induk Ikan Nila, bantuan sarana prasarana budidaya ikan Nila Sistem Bioflok dan dimana bantuan-bantuan tersebut juga turut mendukung dalam upaya mencapai sasaran Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

Dalam pencapaian target kinerja, ada beberapa upaya yang dilakukan agar target kinerja tersebut dapat tercapai, antara lain :

1. Merangkul kelompok pembudidaya ikan yang tersebar diseluruh Kecamatan Kota Banjarbaru.
2. Melaksanakan program pemerintah seperti Program Urban Farming dan mendukung Program RT Mandiri Bidang perikanan.
3. Meningkatkan peran dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan budidaya perikanan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Banjarbaru

melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru baik berupa barang, pendanaan maupun penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para pembudidaya ikan yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh perikanan bersama dengan petugas Bidang Perikanan DKP3;

4. Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder.

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan produksi perikanan budidaya di Kota Banjarbaru, yaitu :

A. Faktor Peluang

1. Tingginya permintaan ikan;
2. Dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Balai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT) Mandingan Kalimantan Selatan berupa bantuan benih ikan Nila, Benih Ikan Koi, bantuan sarana prasarana budidaya ikan Nila Sistem Bioflok serta dukungan pemerintah daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru baik berupa barang, pendanaan maupun penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para pembudidaya ikan yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh perikanan bersama dengan petugas Bidang Perikanan DKP3;
3. Banyaknya tempat usaha dengan produk olahan ikan;
4. Adanya hubungan baik dengan stakeholder.

B. Faktor Kekuatan

1. Akses sarana produksi yang mudah;
2. Potensi sumberdaya alam yang mendukung;
3. Lokasi usaha pembesaran yang strategis; dan
4. Hubungan baik dengan konsumen.

HAMBATAN

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah kualitas benih yang ditebar serta kondisi cuaca yang ekstrim yang turut berpengaruh terhadap budidaya perikanan, keterbatasan lahan dan modal dalam peningkatan produktivitas,

persaingan pasar yang ketat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis bagi pembudidaya.

RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah dengan pemilihan kualitas benih yang unggul serta adanya pelatihan serta bimbingan teknis budidaya sehingga petani ikan mempunyai ilmu budidaya yang mampu meningkatkan produksi perikanan budidayanya, mencari sumber modal alternatif dengan bekerjasama dengan lembaga keuangan atau program pemerintah/swasta serta melakukan efisiensi biaya produksi.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan Indikator Kineja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 dari pagu anggaran sebesar Rp.1.667.990.400 telah terealisasi sebesar Rp.1.485.819.700 atau dengan capaian sebesar 89,08% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Tabel Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.667.990.400	1.485.819.700	182.170.700	89,08
	Jumlah	1.667.990.400	1.485.819.700	182.170.700	89,08

Pada Tabel 16 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp. 1.667.990.400 dan realisasi Rp. 1.485.819.700 dengan capaian 89,08 %.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Produksi Pertanian

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi Pertanian di dukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan
2. Jumlah Populasi Ternak

Untuk pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan

Untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern memerlukan dukungan penyediaan prasarana dan sarana pertanian (Prasatani) demi kelancaran dan keberhasilan kegiatannya. Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa teknologi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berinisiatif menggenjot produktivitas pertanian dengan meluncurkan Revolusi Industri di bidang pertanian. Sarana pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, karena kebutuhan pangan khususnya padi akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah termasuk Kota Banjarbaru, sehingga pengembangan sarana pertanian ini akan selalu ditingkatkan dan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan.

Untuk mengukur Indikator kinerja ini rumus yang digunakan adalah :

$$\textbf{Produksi} = \textbf{Luas panen} \times \textbf{Produktivitas}$$

Untuk realisasi dan capaian Tahun 2024 di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 17. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	7.224,34	7.794,36	107,89%

	sarana Pertanian/ Peternakan				
--	------------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 17 diatas, indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan khususnya padi pada Tahun 2024 di targetkan sebesar 7.224,34 ton dan terealisasi sebesar 7.794,36 ton atau dengan capaian kinerja sebesar 107,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dengan indikator kinerja Jumlah produksi Tanaman Pangan tahun 2024 terhadap target dapat tercapai.

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN

Ada beberapa hal, diantaranya :

1. Pemanfaatkan lahan secara maksimal oleh para petani di banjarbaru. Pemanfaatan lahan pertanian secara maksimal dapat diartikan sebagai pengolahan lahan secara intensif. Pengolahan lahan secara maksimal dilakukan pada seluruh lahan yang akan ditanami. Pengolahan lahan secara maksimal dapat dilakukan dengan: Membabat bersih, Membakar atau menyingkirkan sisa tanaman atau gulma, Melakukan pengolahan tanah lebih dari satu kali.
2. Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian yang dapat membantu pemanfaatan lahan dan peningkatan proses tanam dan panen tanam padi.
3. Program penanaman IP-200 sudah dilaksanakan dengan baik. Penanaman IP 200 program penanaman padi dengan cara tertentu untuk meningkatkan produksi padi. Tujuan dari penanaman IP 200 adalah untuk meningkatkan produksi pangan daerah dan mencapai swasembada pangan.
4. Pemupukan seimbang sehingga produksi tanaman padi meningkat. Pemupukan yang baik dan seimbang adalah pemberian pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemupukan yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan hasil panen, kesuburan tanah, dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Prinsip pemupukan yang baik dan seimbang adalah: Tepat jenis, Tepat dosis, Tepat waktu, Tepat cara, Tepat sasaran.
5. Serangan hama penyakit relatif dapat dikendalikan dengan baik melalui pemanfaatan bahan Pengendali organisme tanaman pangan yang terorganisir dengan baik.

6. Cuaca alam mendukung dan tidak terjadi cuaca ekstrem pada saat musim tanam dan panen tanaman padi musim hujan membuat ketersediaan air cukup tinggi sehingga menjadi waktu yang tepat untuk proses penanaman tanaman padi. Selain itu, para petani juga diharap menanam padi pada saat ketersediaan sinar matahari memadai

Untuk lebih jelasnya data realisasi produksi tanaman pangan khususnya padi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Luas Panen perhektar dan produksi Padi PerKecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan District	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	produktivitas (Ton/Ha)
1.	Landasan Ulin	44,50	240,30	5,40
2.	Liang Anggang	76,00	410,40	5,40
3.	Cempaka	1.269,00	6.852,60	5,40
4.	Banjarbaru Utara	53,90	291,06	5,40
5.	Banjarbaru Selatan	-	-	-
Kota Banjarbaru		1.443	7.794,36	5,40

Sumber Data Bidang Pertanian dan Perkebunan

Dari Tabel 18 diatas dapat dilihat pada tahun 2024 produksi padi adalah sebesar 7,794,36 ton, dimana produksi tersebut tersebar di 4 (empat) kecamatan dengan produksi terbesar berada di kecamatan Cempaka yaitu sebesar 6.852,60 ton, Kecamatan Liang Anggang sebesar 410,40 ton, Kecamatan Banjarbaru Utara sebesar 291,06 ton dan Kecamatan Landasan Ulin sebesar 240,30 ton, sedangkan untuk Kecamatan Banjarbaru Selatan tidak ada memiliki lahan sawah sehingga tidak ada produksi nya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Tabel 19. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		2023		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	7.794,36	107,89%	4.525,81	63,90 %	4.525,98	65,18 %

Berdasarkan tabel 19 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2024 adalah sebesar 7.794,36 ton, tahun 2023 sebesar 4.525,81 ton sedangkan tahun 2022 sebesar 4.525,98 ton.

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 20. Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Banjar (Thn 2023)	Realisasi Kab. Tanah Laut (Tahun 2023)	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian/ Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	7.794,36	107,89%	109.318,53 **	56.167,66 **	10.861,84	1.006.430

Berdasarkan Tabel 20 diatas, realisasi indicator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 7.794,36 ton, jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Banjar (109.318,53 ton / Tahun 2023), realisasi Kabupaten Tanah Laut (sebesar 56.167,66 ton / Tahun 2023), realisasi Kota Banjarmasin (sebesar 10.861,84 ton) dan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan (sebesar 1.006.430 ton) Jumlah produksi Tanaman Pangan khususnya padi Kota Banjarbaru jauh lebih rendah, hal ini disebabkan Banjarbaru merupakan daerah perkotaan dan memiliki luas lahan pertanian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut masih menggunakan data Tahun 2023, karena sampai saat ini data Tahun 2024 belum di dapatkan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Target Nasional
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian/ Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	7.794,36	107,89 %	7.516,21	N

Berdasarkan Tabel 21 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024 adalah sebesar 7.794,36 ton, dengan capaian kinerja sebesar 107,89%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 7.516,21 ton, maka telah terlampaui. Sedangkan untuk target Nasional adalah N (tidak ada) karena adanya perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Masih terdapat peluang pencapaian realisasi yang lebih tinggi, mengingat Peraturan Daerah tentang LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang LP2B ini diharapkan alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dan sarana prasarana produksi pertanian dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya produksi pertanian juga akan meningkat dan dapat mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan.

UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi, ada beberapa upaya yang dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200, maksudnya yang semula tanam satu kali dalam satu tahun menjadi tanam dua kali dalam satu tahun;
2. Dukungan sarana dan prasarana pertanian, diantaranya dengan adanya peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi serta ketersediaan benih unggul.

3. Penerapan sistem pertanaman jajar legowo yang merupakan inovasi pola bertanam dengan berselang seling antara dua atau lebih baris tanaman padi dan di selingi satu baris kosong ;
4. Meningkatkan peran dan dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat (bantuan berupa alat mesin pertanian) maupun pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berupa pendanaan dan memberikan penyuluhan dan bimbingan-bimbingan teknis tentang pertanian kepada para petani yang ada di Kota Banjarbaru.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain Kota Banjarbaru merupakan jenis lahan tadah hujan, apabila musim penghujan lahan akan terendam air dan pada saat kemarau lahan akan mengalami kekeringan, kurangnya prasarana pertanian seperti saluran irigasi tersier untuk pengairan padi sawah, adanya serangan hama Tungro serta serangan hama tikus dan burung.

RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan dalam rangka perbaikan, diantaranya :

1. Penggunaan sarana dan prasarana pertanian secara optimal dan perbaikan saluran air /irigasi tersier.
2. Penambahan irigasi perpompaan.
3. Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) secara tepat guna ;
4. Pengadaan Rubuhan (rumah burung hantu) untuk memangsa hama burung dan tikus.
5. Memaksimalkan pemanfaatan alat mesin pertanian.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.288.154.400 dan realisasi sebesar Rp.5.980.741.206 atau dengan capaian 52,98 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan
----	----------------	-----------	----------

			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.091.964.500	8.106.761.190	985.203.310	89,16%
2.	Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	1.047.842.000	1.031.695.700	16.146.300	98,46%
	Jumlah	10.139.806.500	9.138.456.890	1.001.349.610	90,12 %

Pada Tabel 22 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Penyediaan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 10.139.806.500 dan realisasi sebesar Rp 9.138.456.890 atau dengan capaian 90,12 %.

Analisis Efisiensi Sumberdaya dan Program Penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Pada Tabel 22 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian dan Program penyediaan Prasarana Pertanian adalah sebesar Rp. 10.139.806.500 dan realisasi sebesar Rp 9.138.456.890 atau dengan capaian 90,12% , dan pada Tabel 17 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 107,89 %.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi sumberdaya nya adalah sebesar 17,77%, ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran.

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan sarana Pertanian/Peternakan khususnya dalam pencapaian target Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi) adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dimana pada Program tersebut dilaksanakan Pelatihan, sosialisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian, bibit dan benih yang berkenaan dengan tanaman pangan, hortikultura dalam upaya pencapaian sasaran kinerja

2. Jumlah Populasi Ternak

Sektor Peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Kalimantan Selatan termasuk juga Kota Banjarbaru yang terus didorong untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi daerah penyedia ternak. Peternakan di Banjarbaru hampir sama dengan daerah lain meliputi peternakan hewan besar, kecil dan unggas. Untuk meningkatkan populasi ternak upaya yang dilakukan diantaranya dengan meningkatkan produksi ternak, pengolahan hasil dan pembinaan usaha peternakan, untuk pemenuhan kebutuhan akan protein hewani.

Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan populasi ternak di Kota Banjarbaru, diantaranya dengan menambah sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan yaitu dengan dibangunnya Klinik Hewan, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan (UPT BTPKH) untuk membantu masalah pembibitan ternak dan kesehatan hewan ternaknya, serta pengadaan Mobil Klinik Hewan untuk pelayanan langsung ke lokasi pengguna layanan Kesehatan hewan. Selain itu diadakan pula pelatihan dan penyuluhan tentang peternakan, baik masalah produksi maupun penyakit hewan, sehingga masyarakat ternak lebih memahami usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Untuk realisasi dan capaian Indikator Kinerja Jumlah Populasi Ternak Tahun 2024 di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 23. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.905.400	2.977.722	102 %

Realisasi jumlah populasi ternak pada tahun 2024 sebesar 2.977.722 ekor dengan capaian 102 % dimana capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tercapainya target ini antara lain disebabkan adanya Pemasukan ternak dari luar daerah luar pulau dari NTT dan NTB, serta adanya penyebaran ternak bantuan selain dana yang bersumber dari dana APBD dan ada juga yang bersumber dari dana APBN, yang digunakan untuk pengembangan ternak Kota Banjarbaru melalui Kelompok-Kelompok Tani yang bergerak

di bidang peternakan, dimana kelompok kelompok tani tersebut mendapat bantuan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru. Dengan adanya bantuan ternak kecil dan ternak unggas ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani ternak dan sekaligus juga meningkatkan populasi ternak itu sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi target.

Untuk sebaran dan data jumlah populasi ternak Kota Banjarbaru di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Jumlah Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Serta Unggas Menurut Kecamatan Di Kota Banjarbaru Tahun 2024

No	Kecamatan Sub District	Populasi (Ekor)							
		Sapi Cow	Kambing Goat	Ayam Buras Domestic Hen	Ayam Potong Broiler	Ayam Petelur Laying Pullet	Itik Duck	Burung Puyuh	Babi Pig
1	Landasan ulin	771	1,317	34,492	1,511,000	-	11,345	3,950	0
2	Liang Anggang	528	555	15,471	81,300	36,312	11,775	10,745	-
3	Cempaka	1,904	533	9,364	624,512	446,214	2,517	-	-
4	Banjarbaru Utara	1,181	551	2,730	101,127	-	3,206	-	-
5	Banjarbaru Selatan	307	341	1,596	47,200	-	14,878	-	-
		4,691	3,297	63,653	2,365,139	482,526	43,721	-	0
Jumlah Total		2.977.722 ekor							

Sumber data dari verifikasi dan validasi data peternakan Prov. Kal Sel Th. 2024

Pada tabel 24 di atas terlihat jumlah populasi ternak untuk Tahun 2024 Kota Banjarbaru adalah sebesar 2.977.722 ekor, yang terdiri dari ternak sapi, kambing, babi dan ternak unggas (ayam, itik dan burung puyuh), dengan populasi yang terbesar adalah ternak unggas. Dimana ternak tersebut tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produksi pertanian	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.854.153 ekor	100,11 %	2.867.877 ekor	99,61 %	2.977.722 ekor	102 %

Berdasarkan tabel 25 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2022 adalah sebesar 2.854.153 ekor (100,11%), dan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 2.867.877 ekor (99,61 %), jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 2.977.722 ekor (102 %) terjadi kenaikan, hal ini disebabkan semakin berkembangnya usaha peternakan di Banjarbaru, masyarakat dan Kelompok Tani semakin banyak yang berminat dan berusaha dibidang peternakan. Selain faktor tersebut diatas, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru terus mendukung dan melakukan penyebaran ternak yang cukup banyak dalam rangka program juara Urban farming untuk pengembangan ternak Kota Banjarbaru melalui Kelompok-Kelompok Tani yang bergerak di bidang peternakan, dimana kelompok kelompok tani tersebut mendapat bantuan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru. Dengan adanya bantuan ternak ini sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani ternak dan sekaligus juga meningkatkan populasi ternak itu sendiri yang pada akhirnya dapat mengkatrol realisasi.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Banjar Thn 2023	Realisasi Kab. Tanah Laut Thn 2023	Realisasi Kota Banjarmasin Thn 2023	Provinsi Kalimantan Selatan Thn 2023
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.977.722 ekor	102 %	21.911.919 ekor	39.342.557 ekor	11.006 ekor	88.804.362

Berdasarkan Tabel 26 diatas, realisasi indikator kinerja Jumlah Populasi Ternak Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 2.977.722 ekor , dengan capaian kinerja 102 %, sedangkan untuk data sanding Kabupaten Banjar 21.911.919 ekor, Kabupaten Tanah Laut 39.342.557 ekor, Kota Banjarmasin 11.006 ekor dan Provinsi Kalimantan Selatan 88.804.362 ekor.

Untuk data sanding Provinsi Kalimantan Selatan dan Wilayah sekitar saat ini masih menggunakan data Tahun 2023, karena data untuk Tahun 2024 sementara belum di dapatkan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Target Nasional
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.977.722 ekor	102 %	3.053.159	N

Berdasarkan Tabel 27 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator “Jumlah Populasi Ternak” Tahun 2024 adalah sebesar 2.977.722 ekor dengan capaian kinerja sebesar 102 %, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar

3.053.159 ekor, maka capaiannya baru sebesar 97,53%. Sedangkan untuk target Nasional adalah N (tidak ada) karena adanya perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Masih terdapat peluang pencapaian target yang lebih besar dimasa yang akan datang, mengingat usaha peternakan sekarang sudah mulai diminati oleh sebagian besar masyarakat peternak di Kota Banjarbaru, karena usaha di bidang peternakan memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta adanya perhatian dari Kementerian Pertanian RI khususnya bidang Peternakan untuk memberikan bantuan ternak kepada masyarakat miskin agar perekonomiannya meningkat, sehingga berdampak pula pada peningkatan populasi ternak.

Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya dan program penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Pada Tabel 22 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian pada indikator kinerja JUmlah Populasi Ternak adalah sebesar Rp.5.234.206.000 dan realisasi sebesar Rp 5.062.910.500 atau dengan capaian 96,73 %, sedangkan Pada Tabel 23 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 102 %.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi sumberdaya nya adalah sebesar 5,27%, ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran.

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Populasi Ternak adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dimana pada program tersebut terdapat beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan capaian sasaran kinerja.

Selain Program tersebut diatas, terdapat pula program lainnya dalam upaya peningkatan capaian sasaran kinerja Jumlah Populasi Ternak yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan oleh Bidang Peternakan itu sendiri yaitu pada Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner, dimana program tersebut adalah untuk membantu menangani/pencegahan terhadap penyakit hewan/ternak milik masyarakat.

Selain itu, terdapat pula Program pendukung lainnya yang berasal dari Provinsi dan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kinerja diantaranya :

- ❖ Program Provinsi Kalimantan Selatan berupa Program Swasembada Sapi Potong, dengan bantuan : Straw dan N2 Cair.
- ❖ Program Kementerian Pertanian Vaksinasi PMK, dengan bantuan berupa : vaksin, obat-obatan dan peralatan.
- ❖ Program Kementerian Pertanian “SIKOMANDAN” (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) untuk meningkatkan populasi ternak dengan paket bantuan berupa : operasi kegiatan inseminasi dan pelaporan.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKSANAKAN

Ada beberapa upaya yang dilakukan agar populasi ternak di Kota Banjarbaru terus meningkat, diantaranya :

1. Memberikan pemahaman yang lebih intensif kepada masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang cara beternak yang baik, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk beternak disemua macam jenis ternak, seperti ternak unggas, kambing dan sapi yang akhirnya dapat menambah penghasilan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan dukungan dari pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berupa pendanaan/anggaran untuk pengembangan peternakan yang akhirnya menambah populasi ternak itu sendiri di Kota Banjarbaru.

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan populasi ternak di Kota Banjarbaru, diantaranya :

1. Adanya peningkatan minat masyarakat untuk beternak disemua macam jenis ternak, seperti ternak unggas, kambing dan sapi karena dapat menambah penghasilan ekonomi masyarakat pasca wabah pandemi covid..
2. Peternakan menjadi salah satu bidang yang menjanjikan untuk penambahan pendapatan petani dimasa wabah pandemi ini, seperti unggas menghasilkan telur

dan daging, kambing dan sapi menghasilkan daging sebagai protein hewani untuk masyarakat;

3. Pemasaran hasil peternakan sangat mudah dilingkungan sekitar sehingga kesejahteraan petani masih terjaga;
4. Dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa penyebaran ternak sapi dalam mendukung Program Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu Swasembada Sapi Potong dan pemerintah daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berupa pendanaan/anggaran dan penyuluhan maupun bimbingan teknis terkait dengan bidang dan ilmu peternakan kepada masyarakat peternak sehingga meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengembangan peternakan yang akhirnya menambah populasi ternak itu sendiri di Kota Banjarbaru.

HAMBATAN

Hambatan terbesar yang dihadapi Tahun 2024 dalam peningkatan populasi ternak adalah alih fungsi lahan peternakan, hal ini menyebabkan perkembangan peternakan melambat karena keterbatasan lahan, serta adanya penyakit-penyakit hewan ternak yang menyerang salah satunya LSD (Cacar Ternak) atau yang marak disebut lato-lato di beberapa daerah di Indonesia.

RENCANA TINDAK LANJUT

Ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan :

- a. Meningkatkan peternakan yang intensif
- b. Meningkatkan peternakan yang ramah lingkungan.
- c. Mengusahakan penataan spot-spot peternakan yang sesuai dengan tata ruang wilayah.
- d. Meningkatkan lagi kegiatan surveilans guna deteksi dini untuk penyakit ternak yang mewabah di Kota Banjarbaru.
- e. Meningkatkan kegiatan Vaksinasi ternak antara lain (Vaksin PMK dan LSD)

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian pada Indikator Kinerja Jumlah Populasi Ternak (ekor) adalah sebesar Rp. 5.234.206.500

realisasi sebesar Rp. 5.062.910.500 dengan capaian 96,73 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.234.206.000	5.062.910.500	171.295.500	96,73
	Jumlah	5.234.206.000	5.062.910.500	171.295.500	96,73

Pada Tabel 28 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyediaan dan Pengembangan realisasi Sarana Pertanian sebesar Rp. 5.234.206.000 dan realisasi sebesar Rp 5.062.910.500 atau dengan capaian 96,73%.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani

Sasaran tersebut menjadi sangat penting dan dipilih karena sumberdaya penyuluh dan petani merupakan salah satu ujung tombak agar produktivitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator utama yaitu Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score, dengan rumus :

$$\text{Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score} = \frac{\text{Jumlah Kelompok yang Naik Kelas}}{\text{Jumlah Total kelompok Tani}} \times 100$$

Penilaian kelas Kelompok Tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih berprestasi dalam hal mencapai kelas

kelompok yang lebih tinggi. Selain itu dapat diketahui kekuatan dan kelemahan-kelemahan kelompok yang dimiliki sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan.

Indikator penilaian kelas/kemampuan kelompok tani terdiri dari beberapa aspek :

- 1). Aspek kemampuan merencanakan ; tersedianya rencana belajar dan rencana usaha kelompok tani.
- 2). Aspek kemampuan mengorganisasikan; Kelompok memiliki struktur organisasi, memiliki aturan dan norma yang berlaku untuk anggotanya, dan kelompok memiliki kelengkapan administrasi pembukuan : (Buku anggota, Buku notulen pertemuan, Buku Kegiatan, Buku Tamu, Buku Daftar hadir, Buku Kas, Buku iuran, Buku rencana Kegiatan dan lain lain).
- 3). Aspek kemampuan melaksanakan kegiatan ; Adanya pertemuan rutin kelompok tani, adanya kegiatan rutin belajar di kelompok tani, adanya kegiatan usaha tani, adanya pemupukan modal di kelompok tani dan lain-lain.
- 4). Aspek kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan ; adanya evaluasi usaha kelompok di kelompok tani. Evaluasi ini meliputi : Evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan usaha, Evaluasi dengan melibatkan unsur dari dalam dan luar kelompok tani serta lembaga/instansi terkait.
- 5). Aspek kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani ; Adanya pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus, adanya penyiapan calon pengganti pengurus, adanya periode tertentu untuk pemilihan dan penggantian pengurus dan lain lain.

Setelah dilakukan penilaian terhadap 5 (lima) aspek tersebut, maka selanjutnya dapat ditentukan kelas kemampuan untuk masing-masing kelompok tani sesuai dengan nilai yang diperoleh. Penentuan Kelas kemampuan kelompok tani dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu:

1. Kelas Pemula, skor antara 0 – 245
2. Kelas lanjut, skor antara 246 – 455
3. Kelas Madya, skor antara 456 – 700
4. Kelas Utama, skor antara 701 – 1.000

Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score di Kota Banjarbaru untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 29. Realisasi dan Capaian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas/score	%	69 %	69,25 %	100,36 %

Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas (score) di tahun 2024 ditargetkan sebesar 69 % (dengan rincian sebanyak 214 Kelompok Tani dari total keseluruhan Poktan sebanyak 309 Kelompok Tani) dan terealisasi 69,25% dengan capaian 100,36 %

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan kelompok tani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuannya sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian Kota Banjarbaru dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam penguatan kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memberikan muatan pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani nya.

Peran pemerintah khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam pengembangan kelembagaan petani masih sangat diperlukan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang naik kelas /score, diantaranya dengan cara memberikan penyuluhan, latihan dan konsultasi, monitoring dan evaluasi, pelatihan, bimbingan teknis, SL, Demplot dan diseminasi teknologi kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru

sehingga mampu merangsang pertumbuhan kelembagaan petani serta meningkatkan kapasitasnya.

Pada Tahun 2024 jumlah Kelompok Tani di Kota Banjarbaru berjumlah 309 Kelompok Tani yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru, dan jumlah yang naik kelas (score) berjumlah 214 kelompok Tani, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30. Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Kelompok yang naik kelas /skor

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas (skor)
1.	Liang Anggang	63	49
2.	Landasan Ulin	78	55
3.	Cempaka	82	55
4.	Banjarbaru	86	55
	J u m l a h	309	214

Sumber data dari Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa, dari 309 jumlah kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru jumlah yang meningkat kapasitasnya atau naik kelas (score) adalah sebesar 214 Kelompok. Dimana Kelompok tani tersebut tersebar diseluruh Kecamatan Kota Banjarbaru.

Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/score ditargetkan sebesar 69 % dan terealisasi 69,25 % dengan capaian kinerja sebesar 100,36 %. Hal ini didapat dari jumlah seluruh kelompok tani yang ada di kota Banjarbaru sebesar 309 kelompok tani, sedangkan dari jumlah kelompok tersebut yang naik kelas (score) berjumlah 214 kelompok, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam upaya meningkatkan score / kapasitas kelembagaan kelompok tani, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dibantu dengan para penyuluh pertanian baik ASN maupun Penyuluh Pertanian Swadaya di lapangan yang merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan petani yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru, bersama sama melakukan monitoring, pembinaan/penyuluhan/bimtek/adopsi dan inovasi teknologi maupun penyampaian

program-program terkait kepada Kelompok Tani /kelembagaan petani sehingga kelompok tani mampu mengembangkan usahanya dan menjadi kelompok tani yang mandiri dan meningkat kapasitasnya (score).

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022

Tabel31. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score	%	68,13	101,69	68,33	100,48	69,25	100,36

Berdasarkan Tabel 31 diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas/Score Tahun 2024 (sebesar 69,25 %), jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 (sebesar 68,33%) maka terjadi kenaikan sebesar 0,92 %, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (sebesar 68,13 %) maka terjadi kenaikan sebesar 1,12 %. Hasil ini tercapai berkat kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru beserta jajarannya khususnya Bidang Penyuluhan dengan semua UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di seluruh Kota Banjarbaru beserta dengan seluruh penyuluh yang ada dilapangan dengan meningkatkan semangat kerja dan kompetensi nya untuk melakukan monitoring, pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan langsung ke kelompok tani baik secara teknis, sosial dan ekonomi maupun administrasi kelompok taninya.

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tabel 32. Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten, Kota dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas(Score)	%	69,25	100,36	N	N	N	N

Berdasarkan Tabel 32 diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas (Score) Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebesar 69,25 % (capaian 100,36 %). Untuk realisasi Provinsi data tidak bisa didapatkan karena perbedaan IKU yang digunakan, sedangkan untuk realisasi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin belum didapat (masih dalam perhitungan).

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Target Nasional
1	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score	%	69,25	100,36 %	71 %	22 %

Berdasarkan Tabel 33 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/ScoreTahun 2024 adalah 69,25% dengan capaian kinerja 100,36%, jika dibandingkan dengan target Akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 71 %

maka baru tercapai 97,53 %. Jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 22 %, maka Kota Banjarbaru lebih tinggi. Karena secara Nasional jumlah persentase penyuluh masih kurang dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan dan jumlah Kelompok Tani yang ada di seluruh Indonesia atau satu penyuluh wilayah binaannya merangkap beberapa desa dan kelurahan, sehingga pembinaan peningkatan kelembagaan petani masih rendah. Sedangkan Kota Banjarbaru secara keseluruhan semua kelurahan dibina oleh masing-masing penyuluh pendamping dan dibantu KJF baik KJF Kota maupun KJF Kecamatan sehingga kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (kelas/score) realisasinya lebih tinggi. Namun karena SDM Pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, maka sangat perlu dukungan manajemen peningkatan kualitas SDM yang ada baik melalui penyuluhan, bimtek, pendidikan, pelatihan dan serta pemenuhan sarana prasarana penyuluhan lainnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Program Penunjang

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya anggaran yang tersedia. Semakin rendah sumberdaya yang dihasilkan untuk mencapai sasaran dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi anggarannya semakin besar. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 9,48%. Ini didapat dari selisih antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi capaian anggaran penggunaan anggaran pada Program/kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas/Score. Pada Tabel 34 terlihat Pagu anggaran sebesar Rp. 1.268.936.700, realisasi sebesar Rp. 1.153.212.925 dengan capaian 90,88 %. Pada Tabel 29 terlihat realisasi Capaian kinerja adalah sebesar 100,36% . Dari kedua Tabel tersebut terlihat realisasi capaian kinerja lebih tinggi 9,48 % dari pada realisasi capaian anggaran.

Program utama yang mendukung dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score adalah Program Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru dan Cempaka. Beberapa kegiatan dalam program tersebut dilaksanakan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik kelas (Score), diantaranya demplot, pelatihan,

penyuluhan, sosialisasi dan rapat-rapat dengan kelompok tani/gapoktan, pemenuhan sarana penyuluhan serta fasilitasi pembentukan Badan Usaha milik Petani, yang mana semua kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat petani di Kota Banjarbaru.

Selain Program tersebut diatas ada pula dukungan dari pemerintah pusat berupa dana BOP (Biaya Operasional Penyuluh), paket data untuk seluruh penyuluh, dan bantuan transport yang diterima penyuluh pertanian setiap bulan untuk mendukung kinerja mereka di lapangan dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok tani dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi manajemen korporasi petani berupa pemberian penghargaan kepada insan pertanian tingkat Provinsi, pendampingan manajemen korporasi berupa penumbuhan koperasi tani, temu teknis pimpinan kelembagaan TK kecamatan, bimbingan teknis penguatan kelembagaan penyuluhan, bimbingan teknis bagi anggota KWT (Kelompok Wanita Tani), bimtek optimalisasi manajemen budidaya dan hilirisasi pertanian ramah lingkungan, bimtek pendampingan manajemen penyuluhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN melalui pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan tingkat provinsi dan pertemuan teknis Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian, Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Ahli, Pelatihan Metodologi Penyuluhan dan Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya melalui peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya melalui demplot penyuluh swadaya di kelurahan Cempaka, dan fasilitasi Pakaian Lapangan bagi seluruh Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

Untuk tercapainya sasaran indikator kinerja persentase jumlah poktan yang naik kelas/score ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan, diantaranya :

- a. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap kinerja penyuluh baik tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan secara rutin dan berjenjang.
- b. Melaksanakan pembinaan secara intensif kelembagaan kelompok tani.
- c. Revitalisasi kelompok Tani
- d. Memberikan target kepada semua penyuluh dalam pembinaan kelompok tani
- e. Pengembangan teknologi pertanian yang inovatif

ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN

Tercapainya sasaran indikator kinerja persentase jumlah poktan yang naik kelas/score didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Sebagai Indikator Utama Penyuluh Pertanian adalah meningkatkan Kelas Kelompok Tani atau Score Kelompok Tani yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pertanian.
2. Adanya tambahan jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya sehingga meningkatkan pendampingan Kelompok Tani.
3. Adanya komitmen dan motivasi dari semua SDM Penyuluhan yang ada di dinas, UPT BPP, penyuluh dan petani.

Dukungan dari pemerintah pusat berupa dana BOP (Biaya Operasional Penyuluh), paket data untuk semua penyuluh dan bantuan transport yang diterima penyuluh pertanian setiap bulan untuk mendukung kinerja mereka di lapangan dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok tani dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi manajemen korporasi petani berupa pemberian penghargaan kepada insan pertanian tingkat Provinsi, pendampingan manajemen korporasi berupa penumbuhan koperasi tani ,temu teknis pimpinan kelembagaan Tk kecamatan, bimbingan teknis penguatan kelembagaan penyuluhan, bimbingan teknis bagi anggota KWT (Kelompok Wanita Tani), bimtek optimalisasi manajemen budidaya dan hilirisasi pertanian ramah lingkungan, bimtek pendampingan manajemen penyuluhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN melalui pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan tingkat propinsi dan pertemuan teknis Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian, Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Ahli, Pelatihan Metodologi Penyuluhan dan Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya melalui peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya melalui demplot penyuluh swadaya di kelurahan Cempaka, dan fasilitasi Pakaian Lapangan bagi seluruh Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

HAMBATAN

Beberapa hambatan yang di hadapi dalam pencapaian kinerja

- Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan usahatani, sehingga mempengaruhi dalam pencapaian penambahan jumlah kelompok tani binaan.
- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani dalam upaya meningkatkan kenaikan kelas kelompok tani secara berjenjang.
- Tingkat pendidikan petani yang masih rendah, sehingga menyebabkan lambatnya peningkatan inovasi dalam usahatani.
- Masih kurangnya minat generasi muda untuk berusaha ke sektor pertanian

RENCANA TINDAK LANJUT

- Perlunya dilaksanakan bimbingan teknis secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan kemampuan kenaikan kelas kelompok tani oleh penyuluh pendamping.
- Pendampingan berkelanjutan oleh penyuluh pendamping dalam penerapan inovasi dalam usaha tani.
- Bimbingan pemberdayaan kelompok tani yang lebih baik dengan pembentukan badan hukum sehingga legalitas kelompok tani secara hukum dapat dipertanggung jawabkan
- Peningkatan media informasi melalui Media Sosial berupa siaran Radio, FB, IG, Youtube, Pameran, Instagram, Spanduk, Foster dan lain-lain dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan petani dalam mengembangkan usahatani.
- Peningkatan koordinasi kepada petani tentang program pemerintah yang bisa melindungi dan menambah permodalan usahatani seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan AUP (Asuransi Usaha Tani Padi).
- Penumbuhan Petani Milenial untuk regenerasi jumlah petani yang semakin berkurang
- Pengembangan jejaring kerjasama untuk petani milenial

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Untuk mencapai sasaran meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani pada Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 34. Tabel Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Penyuluhan Pertanian	1.268.936.700	1.153.212.925	115.723.775	90,88
	Jumlah	1.268.936.700	1.153.212.925	115.723.775	90,88

Pada Tabel 34 diatas terlihat jumlah pagu untuk Program Penyuluhan Pertanian adalah sebesar Rp.1.268.936.700, realisasi sebesar Rp. 1.153.212.925,- dengan capaian 90,88%.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Program dan Kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 memuat laporan pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 4 (empat) target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program, kegiatan ataupun sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya, akan tetapi masih bisa dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Hasil yang telah dicapai Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Esselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,35	88,60	98,06%	AA (sangat memuaskan)
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	450,85 ton	464,37 ton	103 %	AA (sangat memuaskan)
3.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	7.224,34 ton	7.794,36 ton	107,89 %	AA (sangat memuaskan)
		Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2.905.400 ekor	2.977.722 ekor	102,49 %	AA (sangat memuaskan)
5.	Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani	Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas (score)	69 %	69,25 %	100,36%	AA (sangat memuaskan)

Sumber data diolah DKP-3 Tahun 2024

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta di dalamnya.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Beberapa langkah perbaikan yang telah dan dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman kepada sebagian besar masyarakat Kota Banjarbaru melalui penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis tentang makanan sehat dan bergizi, sehingga mereka mau dan mulai selektif dalam membeli dan menyediakan bahan pangan bagi diri dan keluarganya dengan lebih memperhatikan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
2. Memberikan bantuan kepada pokmas posyandu berupa bantuan uang PMT agar menjadi edukasi penganekaragaman konsumsi pangan B2SA.
3. Memberikan bantuan kepada pokmas UMKM berupa hibah uang untuk mengembangkan olahan pangan lokal Kota Banjarbaru.
4. Merangkul kelompok pembudidaya ikan yang tersebar diseluruh Kecamatan Kota Banjarbaru.
5. Melaksanakan program pemerintah seperti Program Urban Farming dan mendukung Program RT Mandiri Bidang Perikanan
6. Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder.
7. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200, maksudnya yang semula tanam satu kali dalam satu tahun menjadi tanam dua kali dalam satu tahun;
8. Dukungan sarana dan prasarana pertanian, diantaranya dengan adanya peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi serta ketersediaan benih unggul.
9. Penerapan sistem pertanaman jajar legowo yang merupakan inovasi pola bertanam dengan berselang seling antara dua atau lebih baris tanaman padi dan di selingi satu baris kosong ;
10. Memberikan pemahaman yang lebih intensif kepada masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang cara beternak yang baik, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk beternak disemua macam jenis ternak, seperti ternak unggas, kambing dan sapi yang akhirnya dapat menambah penghasilan ekonomi masyarakat.
11. Melaksanakan pembinaan secara intensif kelembagaan kelompok tani.

12. Revitalisasi kelompok Tani.
13. Memberikan target kepada semua penyuluh dalam pembinaan kelompok tani.
14. Pengembangan teknologi pertanian yang inovatif.
15. Meningkatkan peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berupa alat mesin pertanian/perikanan maupun pendanaan/anggaran untuk pengembangan Program-Program Pangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Kota Banjarbaru, sehingga perekonomian dan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat tani dapat meningkat.

